[**Integrasi Aplikasi Keuangan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Pusat**](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/8238-integrasi-aplikasi-keuangan-satuan-kerja-satker-pemerintah-pusat)

 Dibuat: Rabu, 24 Juli 2013 10:09

 Ditulis oleh BPPK

Oleh: 

Muldiyanto / NIP. 196906101990121001

Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Dalam rangka mendukung *good governance* dan penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan  yang bersifat umum dan kewengan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam menyelenggaran kewenangan tersebut, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dala kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan dan manager keuangan. Dengan demikian dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran.

Seiring dengan tuntutan pelayanan yang harus cepat, transparan, profesional,  dan akuntanbel, Kementerian Keuangan menyediakan sebuah aplikasi keuangan adalah sebuah tool yang dibuat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Aplikasi keuangan tersebut dibangun sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan harapan bahwa keputusan dan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat, transparan, akurat dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para steakholder.

Terkait dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan seluruh kementerian negara/lembaga, Kementerian Keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas aplikasi keuangan yang dioperasionalkan mulai dari tingkat Satuan Kerja sampai dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar Integrasi Aplikasi keuangan dibawah ini:

Berdasarkan tayangan gambar di atas, kita dapat melihat secara komprehensip keterkaitan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Dalam penulisan makalah ini, penulis akan menjelaskan siklus dan fungsi aplikasi keuangan tersebut berdasarkan aplikasi keuangan yang diterapkan saat ini (Exciting) pada satker kementerian negara/lembaga sampai pada aplikasi keuangan yang diterapkan pada KPPN . Pada level satuan kerja (satker) Secara garis besar aplikasi keuangan dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) level aplikasi, yaitu :

1. Aplikasi perencanaan dan penganggaran, antara lain : Aplikasi RKAKL DIPA

2. Aplikasi pelaksanaan Anggaran, antara lain : Aplikasi GPP Satker, Aplikasi TRPNBP, Aplikasi AFS, Aplikasi SPP SPM

3. Aplikasi pelaporan keuangan, antara lain : Aplikasi Simak Persediaan, Aplikasi Simak BMN dan Aplikasi SAKPA

Pada level Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), aplikasi keuangan yang berhubungan langsung dengan aplikasi keuangan pada level satker adalah Aplikasi GPP KPPN, Aplikasi SP2D, Aplikasi SAK dan Aplikasi AFK

A.      Aplikasi RKAKL – DIPA

Dilihat siklus Aplikasi, aplikasi ini merupakan aplikasi awal terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/lembaga. Setelah melalui proses pembahasan/penelaahan dokumen RKA KL tersebut di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sampai menjadi produk hukum berupa UU APBN, proses selanjut secara aplikasi adalah dilakukan pencetakan dokumen DIPA Induk dan Petikan DIPA.

B.      Aplikasi GPP Satker

Aplikasi ini sebenarnya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai aplikasi pencetakan dokumen perhitungan gaji pegawai PNS/Hakim/Polisi, dan juga sebagai aplikasi pendukung pada aplikasi RKAKL DIPA. Sebagai supporting pada Aplikasi RKAKL, karena dasar perhitungan untuk pengalokasinya belanja gaji dan tunjangan satker, akan lebih akurat dan riil jika didasarkan pada softcopy (ADK) perhitungan gaji gaji induk bulanan pada Aplikasi GPP satker, walaupun tingkat akurasinya belum bisa 100 %.

Bentuk integrasi aplikasi GPP Satker dengan KPPN dilakukan dengan cara validasi data Arsip Data Komputer (ADK) pada Aplikasi GPP KPPN, yaitu pada setiap kali satker mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji dan tunjangan ke KPPN.

C.      Aplikasi TRNPNBP

Aplikasi ini juga memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai:

- Aplikasi perencanaan dan pencatatan realisasi penerimaan negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Supporting data pada Aplikasi RKAKL – DIPA terkait dengan perekaman data rencana target penerimaan yang harus diinput dalam proses melengkapi data DIPA.

D.      Aplikasi Forecasting Satker (AFS)

Aplikasi ini merupakan bagian awal dari sebuah proses pelaksanaan anggaran. Ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan merealisasikan anggarannya, maka PPK harus membuat dokumen perencanaan kas yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan tagihan kepada negara dan juga sebagai bagian kewajiban satker untuk memberikan data perencanaan kasnya ke KPPN. Mekanisme penyusunan data perencanaan kas (Cash Forecasting) ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi AFS berdasarkan dokumen DIPA dan Petunjuk Operasionak Kegiatan (POK). Data perencanaan kas dari satker akan divalidasi dengan aplikasi perencanaan kas yang ada pada KPPN, yaitu Aplikasi Forecasting KPPN (AFK).

E.       Aplikasi SPP – SPM

Aplikasi ini berfungsi untuk membuat dokumen tagih yang akan diajukan ke negara melalui KPPN. Aplikasi ini dibuat dengan 2 (dua) user, yaitu sebagai user selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan user selaku Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM). User ini dipisahkan dengan tujuan agar berjalannya fungsi cek dan balance antara PPK dan PPSPM, karena tugas dan tanggungjawabnya memang berbeda. Dokumen atau Output yang dihasilkan dari aplikasi SPP - SPM adalah :

-  Dokumen Surat Permintaan pembayaran (SPP) - PPK

-  Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) – PPSPM

Dasar penyusunan dokumen SPP dan SPM adalah dokumen DIPA yang dihasilkan oleh aplikasi RKAKL DIPA. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses perekaman data SPP, pengguna aplikasi SPP-SPM harus melakukan proses Restore data DIPA berdasarkan softcopy (ADK) dari aplikasi RKAKL DIPA.

Bentuk integrasi data Aplikasi SPM dengan KPPN adalah adanya proses validasi data ADK SPM yang dikirim oleh PPSPM satker. KPPN akan memvalidasi setiap tagihan kepada negara dengan menggunakan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

F.       Aplikasi SAKPA

Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan pada tingkat satker, berupa laporan :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- Laporan Neraca

- Laporan monitoring anggaran dan realisasi lainnya.

Sebagai sebuah aplikasi yang melakukan peran kompilasi data laporan, aplikasi ini tidak dapat berdiri sendiri dalam proses penyusunan laporannya. Aplikasi SAKPA berintegrasi dan bersinergi dengan aplikasi RKAKL DIPA, Aplikasi SPM, dan Aplikasi Simak Persediaan/BMN.

Peran aplikasi RKAKL DIPA adalah memberikan data pagu anggaran yang akan dibanding dengan realiasasi anggaran. Data realisasi anggaran diperoleh dari aplikasi SPM yang telah diregister/dicatat nomor SP2D nya. Didalam aplikasi SAKPA, data DIPA dan SP2D akan diolah menjadi laporan realisasi anggaran (LRA).

Dalam proses penyusunan laporan Neraca, aplikasi SAKPA berintegrasi dengan aplikasi Simak Persediaan dan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan data eksport berupa ADK Aplikasi Persediaan/Barang Milik Negara dan data ADK aplikasi SPM, aplikasi SAKPA akan mengolah menjadi sebuah laporan Neraca dan laporan keuangan lainnya.

Bentuk integrasi Aplikasi SAKPA satker dengan KPPN adalah adanya proses rekonsiliasi data laporan yang dilakukan setiap bulan antara satker dan KPPN. Proses rekonsiliasi di KPPN dilakukan oleh seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera) dengan menggunakan Aplikasi Vera (SAK KPPN)

Berdasarkan penjelasan siklus dan fungsi aplikasi keuangan yang diterapkan oleh Satker saat ini, secara fungsional sudah memadai dan mendukung pengelolaan keuangan yang modern. Akan tetapi, dilihat dari spesifikasi teknis aplikasi yang ada saat ini, aplikasi masih perlu disempurnakan lagi, hal ini dapat dilihat dari berbagai kekurangan aplikasi, sbb:

- Pada Aplikasi RKAKL DIPA, pada saat perekaman data item belanja pada sub menu Form Belanja, kadang-kadang terdapat masalah yaitu aplikasi tidak memberikan respon apa-apa ketika user menekan tombol pembatalan atau penyimpanan data (status aplikasi “Hang”). Akibat kejadian tersebut, data-data RKAKL yang dinput tidak bisa tersimpan, dan harus mengulang proses perekaman. Kecuali jika fasilitas “**Auto Save”** diaktifkan maka resiko kehilangan data dapat diminimalisir.

-Database aplikasi belum terintegrasi secara penuh dengan konsep single database, sehingga menyulitkan user ketika akan mengoperasikan aplikasi tertentu, masih harus melakukan proses import data terlebih dari output data aplikasi lainnya (Contoh: Data DIPA harus dimport ke Aplikasi SPP-SPM), idealnya apabila database terintegrasi secara penuh, maka antar satu aplikasi dengan aplikasi lain saling mendukung basis datanya.

- Jenis database yang digunakan tidak sama untuk setiap aplikasi sehingga dapat menimbulkan permasalahan terkait keamanan dan kerahasiaan data, misalnya :

Aplikasi RKAKL DIPA, SAKPA : database Foxpro

Aplikasi GPP Satker, SPP-SPM, Simak Persediaan/BMN: database Mysql

-  Proses instalasi aplikasi terutama database sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, sebuah komputer telah diinstall aplikasi SPP-SPM, kadang tidak selalu berhasil pada saat diinstall aplikasi Simak BMN/Persediaan. Jadi pada proses instalasi tersebut ada yang “Crash” pada saat proses aktivasi “Services Database”.

**Saran dan masukan**

Melihat fenomena dan kendala aplikasi keuangan yang digunakan satker saat ini, sebaiknya pengembangan aplikasi satker dalam bentuk single aplikasi dan database dapat segera diwujudkan. Dalam wacana penerapan aplikasi  Sistem Perbendaharaan dan Anggaran (SPAN), modul aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang nantinya akan menggantikan berbagai jenis aplikasi keuangan yang digunakan satker ini, diharapkan akan lebih bagus dan mudah untuk dioperasional (user friendly) dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan data yang lebih baik.